

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Arifin, M., *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, Golden Terayon Press, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Diantha, I Made Pasek, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta
- Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, 2012, *Modul Bagi Pembimbing Kemasyarakatan*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta.
- Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, 2016, *Standar Bimbingan Klien Pemasyarakatan*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta.
- Juvenile Justice Reform Commission, 2007, The Rights of Children in Conflict with the Law, Ministry of Justice of Montenegro, Studio MOUSE-Podgorica, Montenegro.*
- Kartini, Kartono, 2005, *Patologi Sosial*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Muladi, Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Nuraheni, Novie Amalia, 2009, *Sistem Pembinaan Edukatif Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sarwono, S.W., 2001, *Psikologi Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif, PT Rajagrafindo Persada*, Jakarta

Soejono, H. Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung.

Sunggono, Bambang, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Syamsudin, M., 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. JURNAL

Azza, Azyumardi, “Pendidikan Akhlak dan Budi Pekerti ‘Membangun Kembali Anak Bangsa’”, *Mimbar Pendidikan*, No.1/XX, 2001.

Bagaric, Mirko, Peter Isham, Jennifer Svilar, “The Increased Exposure to Coronavirus (COVID-19) Prisoners Justifies Early Release: and The Wider Implications of This for Sentencing – Reducing Most Priso Terms Due to the Harsh Incidental Consequences of Prison”, *Pepperdine Law Review*, Vol. 48, No. 4, 2020.

Hakim, Lukman, “Internalisasi Nilai-nilai Agama Islam dalam Pembentukan Sikap dan Perilaku Siswa SD IT AL-Muttaqin Kota Tasikmalaya”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 10, No. 1, 2012.

J.M., Caplan, “Parole System Anomie: Conflicting Models of Casework and Surveillance”, *Federal Probation*, 2005.

Muhtadi, Ali, “Strategi untuk Mengimplementasikan Pendidikan Budi Pekerti Secara Efektif di Sekolah”, *Dinamika Pendidikan*, Vol 17, No. 1, Mei 2010.

Nugroho, Okky Cahyo, “Peran Balai Pemasarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Di Tinjau dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal HAM*, Vol. 8, No. 2, Desember 2017.

Peter, Ramot, “Peran Orangtua dalam Krisis Remaja”, *Humaniora*, Vol. 6, No. 4, Oktober 2015

Rahmasari, Fariha Suci, Pengawasan Narapidana Pembebasan Bersyarat Oleh Pembimbing Kemasyarakatan – Tantangan dan Alternatif

Penyelesaiannya, *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 7, No. 2, 2020.

SK, Brooks, et al., “The Psychological Impact of Quarantine and How to Reduce It: Rapid Review of the Evidence”, *Lancet*, 2020.

Suroto, “Harkat dan Martabat Manusia dalam Pandangan Kenegaraan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol.2, No. 3, September-Desember 2015.

Sinaga, Sonta Merauke, Elvi Zahara Lubis, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Kejahatan dalam Persidangan Anak”, *Mercatoria*, Vol. 3, No. 1, 2010.

Tirtakusuma, Andreas Eno, “Modifikasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Kajian Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19)”, *Selisik*, Vol. 6, No. 1, Juni 2020.

Wahidin, Unang, “Pendidikan Karakter bagi Remaja”, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 2, No. 3, 2013.

C. HASIL PENELITIAN/TUGAS AKHIR

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat, 2015, *Kajian Data Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta*, hasil penelitian, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat, Yogyakarta.

Hero Herlambang B, 2009, Peran Balai Pemasyarakatan dalam Pembimbingan Narapidana Pembebasan Bersyarat, *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Karsinah, Rini, 2020, Hubungan Bimbingan Agama dan Identitas Diri dengan Self Control Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta, *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatulla, Jakarta.

Panjaitan, Senator Boris, 2015, Peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam Melakukan Pembimbingan terhadap Anak yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat, *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Tasya Sondang Angelica, 2020, *Implementasi Pidana Pelatihan Kerja dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta (BPRSR)*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

D. MAKALAH

Nugraha Setiawan, “Teknik Sampling”, Makalah, Diklat Metodologi Penelitian Sosial, Parung Bogor, 25-28 Mei 2005.

E. INTERNET

Anthony, Thalia, “Why Releasing Some Prisoners is Essential to Stop the Spread of Coronavirus”, <<https://theconversation.com/why-releasing-some-prisoners-is-essential-to-stop-the-spread-of-coronavirus-133516>>, The Conversation University of Technology Sydney, [diakses pada 31 Januari 2021].

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “KBBI Kemendikbud”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembimbingan>, diakses pada 7 Oktober 2020.

Bapas Kelas I Yogyakarta, “Selayang Pandang”, <http://bapasyogya.info/sibango/Pages-20180119042308-SELAYANG-PANDANG.kiosk>, diakses pada tanggal 29 Januari 2021.

Elvina, Laura, “WHO Tetapkan Wabah Virus Corona Sebagai Pandemi Global”, <https://www.kompas.tv/article/70893/who-tetapkan-wabah-virus-corona-sebagai-pandemi-global>, diakses pada 3 Oktober 2020.

Gus, “Kasus Kriminal Libatkan Anak di Yogya Tinggi, Penyebabnya Ternyata Sepele”, <https://www.krjogja.com/berita-lokal/diy/yogyakarta/kasus-kriminal-libatkan-anak-di-yogya-tinggi-penyebabnya-ternyata-sepele/>, diakses pada 7 September 2020.

Hiarej, Edward Omar Sharief, “Alasan Asimilasi dan Integrasi Narapidana di Tengah Wabah COVID-19”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t5ef9af3f9bfde/alasan-asimilasi-dan-integrasi-narapidana-di-tengah-wabah-COVID-19/>, diakses pada 8 September 2020.

Larassaty, Levi, “Pembebasan Napi karena Pandemi Dihujat, Berikut 8 Negara yang Melakukan hal Sama dengan Indonesia Termasuk Turki”, <https://health.grid.id/read/352110790/pembebasan-napi-karena-pandemi-dihujat-berikut-8-negara-yang-melakukan-hal-sama-dengan-indonesia-termasuk-turki?page=all>, diakses pada 8 September 2020.

Mashabi, Sania, “Menkumham: Dari 38.882 Napi Asimilasi Hanya 0,12% yang Melakukan Kejahatan Ulang”, <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/06/12321711/menkumham-dari-38882-napi-asimilasi-hanya-012-persen-yang-melakukan> >, diakses pada 1 Februari 2021.

Nurhadi, M., “Cegah Corona, Puluhan Napi di Gunungkidul Bebas Bersyarat”, <https://jogja.suara.com/read/2020/04/03/093104/cegah-corona-puluhan-napi-di-gunungkidul-bebas-bersyarat?page=all>, diakses 9 September 2020.

Sulaiman, M. Reza, Risna Halidi, “Anak Berhadapan Hukum Tertinggi, Potret Buram Perlindungan Anak Indonesia”, <https://www.suara.com/health/2019/07/23/071000/anak-berhadapan-dengan-hukum-potret-buram-perlindungan-anak-di-indonesia?page=all>, diakses pada 7 September 2020.

World Health Organization, “Q&A on Coronaviruses (COVID-19)”, <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-coronaviruses>, diakses pada 3 Oktober 2020.

_____, “Kasus Pidana Anak di PN Yogyakarta”, <https://jogja.tribunnews.com/2019/01/28/kasus-pidana-anak-di-pn-yogyakarta?page=3>, diakses pada 7 September 2020.

F. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

United Nations Children Fund, Convention on The Rights of Child, Resolusi PBB No. 44/25, 20 November 1989.

United Nations Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice, Resolusi PBB No. 40/33, 29 November 1985.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57).

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842).

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846).

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1052).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Pengubahan

Klas Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1452).

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1716).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 282).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 298).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 32 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1580).

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak.

Keputusan Menteri No. M.01.PR.07.03 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemasarakatan.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat-syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan.

Pentunjuk Pelaksanaan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. E-39-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasarakatan.

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. PAS-17.OT.02.01 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan.

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. PAS-09.PR.01.02 Tahun 2016 tentang Standar Bimbingan Klien Pemasyarakatan.

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PAS-06.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan,

Surat Edaran Nomor: PAS.-636.PK.01.01.04 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Registrasi Balai Pemasyarakatan, Lembaga Penempatan Sementara, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kegiatan Perjalanan Dinas bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019. (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 77).